

BAB I

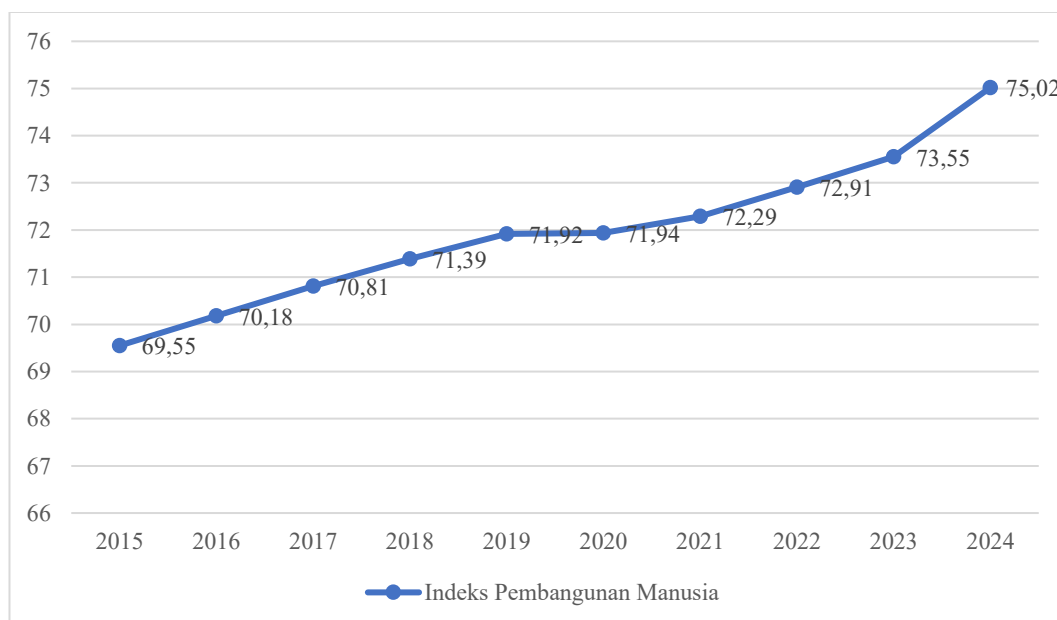
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek fundamental dalam pertumbuhan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup yang layak (BPS, 2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi guna meningkatkan capaian IPM secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah telah melakukan beberapa program di berbagai sektor sebagai upaya perbaikan (kemenkeu, 2025). Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas. Di bidang pendidikan, upaya tersebut mencakup pembangunan kembali gedung sekolah yang rusak, penerapan program wajib belajar selama 12 tahun, dan peningkatan kualitas sekolah melalui penyempurnaan kurikulum. Upaya pemerintah juga terfokus pada peningkatan kualitas pendidik atau guru dengan menerapkan sertifikasi bagi guru pegawai negeri sipil. Dalam sektor kesehatan, pemerintah telah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Selain itu,

perbaikan kualitas dilakukan dalam bentuk peningkatan alat-alat kesehatan dan infrastruktur puskesmas serta rumah sakit daerah di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Dua sektor ini terus mendapat perhatian dari pemerintah setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks sektor pendidikan, indeks sektor kesehatan, dan jumlah kemiskinan. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut adalah gambar data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun 2015-2024.



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1. 1

Data Pertumbuhan IPM Indonesia Periode 2015 – 2024

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2024. IPM Indonesia menaik dari tahun 69,55 pada tahun 2014 menjadi 75,02 pada 2024. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2016– 2019, IPM Indonesia tumbuh 0,90 persen. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 0,02 persen diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya perekonomian di Indonesia, kemudian mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021-2024. Namun, peningkatan tersebut tidak merata di seluruh wilayah, khususnya di pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi (BPS, 2025). Berikut data IPM per provinsi di tahun 2024.

Tabel 1. 1

Data Indeks Pembangunan Manusia Per Provinsi di Indonesia tahun 2024

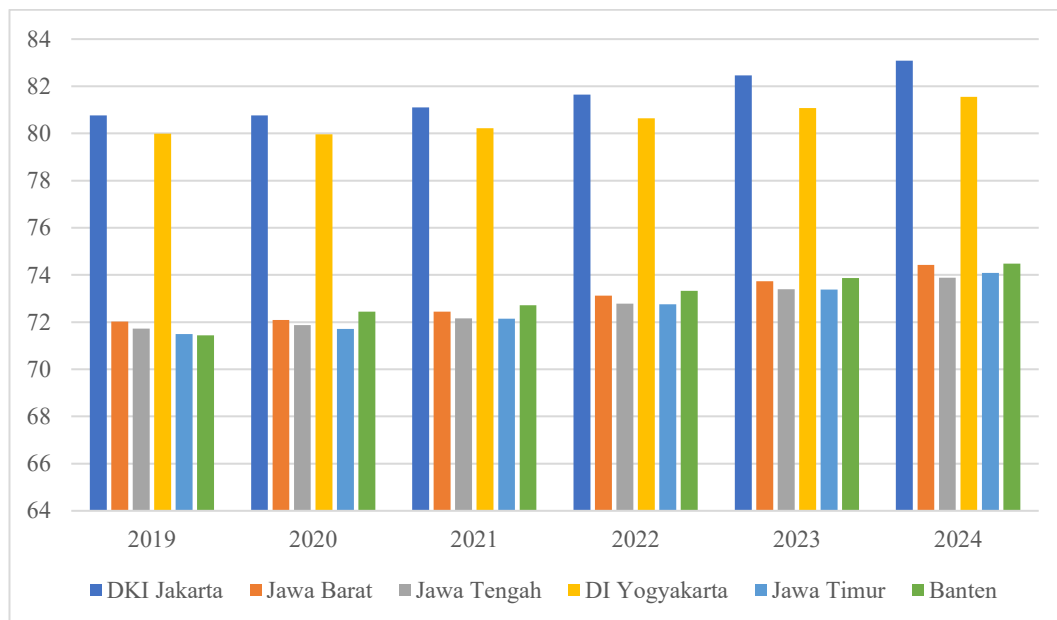
Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
Aceh	74.03
Sumatera Utara	74.02
Sumatera Barat	74.49
Riau	74.79
Jambi	73.43
Sumatera Selatan	72.3
Bengkulu	73.39
Lampung	71.81
Kep. Bangka Belitung	73.33
Kep. Riau	77.97
Dki Jakarta	83.08
Jawa Barat	74.43
Jawa Tengah	73.88
DI Yogyakarta	81.55
Jawa Timur	74.09

Banten	74.48
Bali	77.76
(1)	(2)
Nusa tenggara Barat	70.93
Nusa tenggara Timur	67.39
Kalimantan Barat	70.13
Kalimantan Tengah	72.73
Kalimantan Selatan	73.03
Kalimantan Timur	78.83
Kalimantan Utara	73.02
Sulawesi Utara	75.03
Sulawesi Tengah	71.56
Sulawesi Selatan	74.05
Sulawesi Tenggara	73.48
Gorontalo	71.23
Sulawesi Barat	68.2
Maluku	71.57
Maluku Utara	71.03
Papua Barat	67.02
Papua Barat Daya	68.63
Papua	73
Papua Selatan	67.9
Papua Tengah	59.75
Papua Pegunungan	53.42

Sumber: Data BPS, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terdapat disparitas yang signifikan dalam IPM di antara 38 provinsi di Indonesia. Hanya dua provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, yang memiliki rentang IPM antara 80-83 (BPS, 2025). Fenomena ini menjadi menarik karena hanya dua provinsi di Pulau Jawa yang mencapai rentang IPM di atas 80, sementara empat provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, masih memiliki IPM di bawah rentang 75. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan populasi terbesar di Indonesia memiliki variasi dalam tingkat pembangunan manusianya. Meskipun secara umum memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di

Indonesia, masih terdapat disparitas antar provinsi yang patut diteliti lebih lanjut (BPS, 2025).



Sumber: Data BPS, 2025

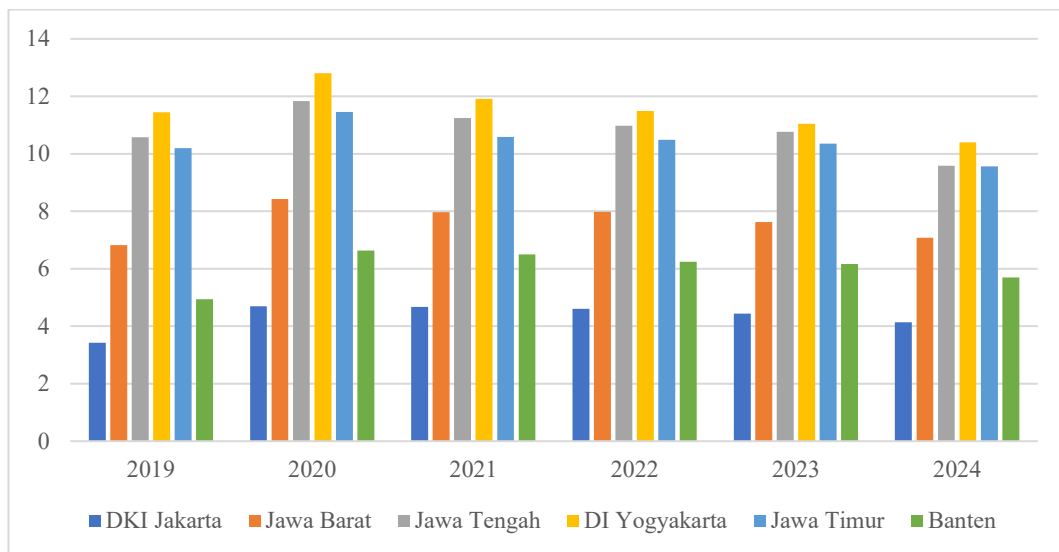
Gambar 1. 2

Data IPM pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2024 (persen)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat Provinsi Jawa Timur selalu memiliki IPM terendah di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki IPM tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan IPM setiap tahunnya. DKI Jakarta yang merupakan Provinsi dengan IPM tertinggi yaitu 83,08 kemudian diikuti DIY dengan 81,55 lalu ada Banten 74,48 kemudian Jawa Barat 74,43 lalu Jawa Tengah mengikuti 73,88 dan yang terakhir Jawa Timur 74,09 IPM Jawa Timur merupakan yang terendah di Pulau Jawa, hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan unsur-unsur pembangunan manusia antara lain: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Secara umum, berbagai faktor ekonomi dan sosial mempengaruhi perkembangan IPM, termasuk kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas. Kemiskinan menjadi isu sentral dalam pembangunan manusia karena individu yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai (Todaro & Smith, 2020). Pembangunan manusia di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mengurangi tingkat kemiskinan (Ginting, 2018). Menanam investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan akan memiliki dampak lebih besar bagi penduduk yang berada dalam kondisi miskin daripada bagi mereka yang tidak miskin, karena tenaga kerja kasar merupakan aset utama dari penduduk miskin. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dapat secara signifikan berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan dengan demikian, meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Capaian IPM Provinsi di Pulau Jawa memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut, namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM di Pulau Jawa yang diharapkan. Laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak secepat kenaikan persentase kemiskinan. Persentase kemiskinan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam gambar 1.3 berikut



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1.3

Data Kemiskinan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2024 (persen)

Dilihat dari gambar 1.3 yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi DI Yogyakarta, dan diposisi kedua Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur berada diposisi tertinggi ke tiga dengan presentase sebesar 9.56, sedangkan dilihat dari jumlah penduduk termiskin dalam jiwa, provinsi Jawa Timur juga berada di urutan tertinggi. Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mengalami ketidakstabilan dan selalu mengalami perubahan. Persentase tingkat kemiskinan dari tahun 2019 sampai 2024 terus mengalami perubahan naik turun atau fluktuasi di setiap Provinsi di pulau Jawa. Meski perubahannya tidak terlalu tinggi, namun tetap saja perubahan tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian. Perekonomian yang baik dicerminkan dari penurunan tingkat kemiskinan yang semakin terus menurun dari tahun ketahun.

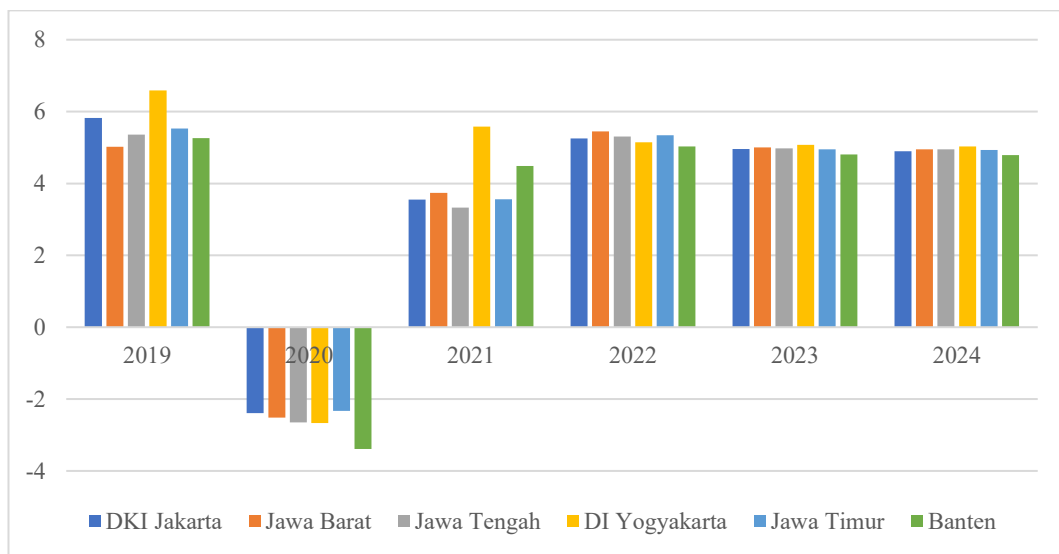
Pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang berada di ambang kemiskinan, terutama di perkotaan, karena kelompok ini sangat rentan dan mudah terperosok ke dalam tingkat kemiskinan yang lebih dalam, dimana penelitian terkini menunjukkan bahwa masyarakat miskin perkotaan menghadapi kerentanan multidimensi yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, termasuk tingginya biaya hidup, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ketidakstabilan pekerjaan informal (Suryahadi et al., 2020). Untuk daerah pedesaan, perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mengurangi tingkat kemiskinan, dimana Todaro dan Smith (2020) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk jalan, irigasi, dan akses komunikasi, merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan peluang ekonomi di luar sektor pertanian, sementara studi Wardhana et al. (2021) di Indonesia menemukan bahwa perbaikan infrastruktur jalan di pedesaan signifikan meningkatkan akses pasar dan mengurangi kemiskinan sebesar 12-15%.

Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan IPM, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan wujud dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan ekspansi kapasitas produktif perekonomian (Mankiw, 2019), dan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB riil yang menjelaskan seberapa cepat perekonomian berkembang dan menciptakan kesempatan kerja baru (Blanchard, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan IPM, terutama jika pertumbuhan

tersebut tidak inklusif dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, sebagaimana penelitian Ranis et al. (2019) mengidentifikasi empat pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yaitu pertumbuhan yang mendorong pembangunan manusia, pertumbuhan tanpa pembangunan manusia, pembangunan manusia yang mendorong pertumbuhan, dan siklus buruk di mana keduanya stagnan.

Konsep pertumbuhan inklusif menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara merata, dimana menurut Asian Development Bank (2020), pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi baru tetapi juga memastikan akses yang setara terhadap kesempatan tersebut bagi seluruh segmen masyarakat, terutama kelompok marginal, sementara studi Ianchovichina dan Lundstrom (2019) menemukan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan inklusif menunjukkan peningkatan IPM yang lebih cepat dibandingkan negara dengan pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu. Di Indonesia, penelitian Yusuf et al. (2020) mengungkapkan bahwa periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (2010-2014) tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan yang signifikan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, sehingga diperlukan kebijakan strategis seperti investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas dimana Hanushek dan Woessmann (2020) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial adaptif yang mampu merespons guncangan ekonomi seperti Program Keluarga Harapan yang

terbukti efektif mengurangi kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, dan penguatan tata kelola serta akuntabilitas pembangunan (Nugroho et al., 2022).



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1. 4

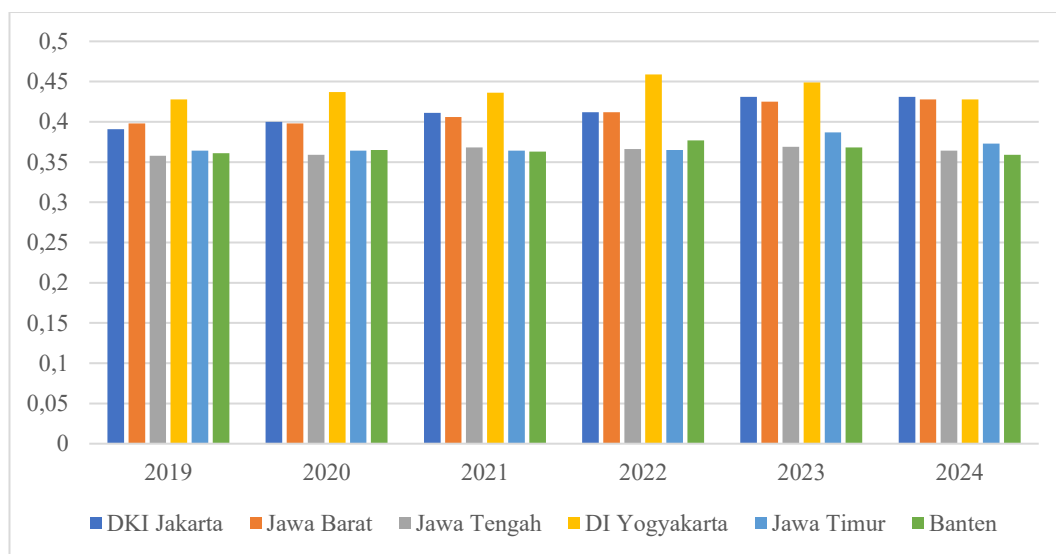
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2024 (persen)

Gambar 1.4 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi sangat fluktuatif, di mana sempat terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 seluruh provinsi mengalami laju pertumbuhan negatif, ini semua disebabkan oleh Covid-19, hal ini juga sebagai pemicu naiknya angka ketimpangan pendapatan di 6 provinsi di Pulau Jawa. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa meskipun DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa (5,27% pada tahun 2023), provinsi ini juga memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dengan nilai Gini Ratio mencapai 0,40, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi disparitas pendapatan di antara anggotanya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang krusial. Kesenjangan terjadi ketika pendapatan suatu masyarakat di suatu wilayah lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan pendapatan yang terbatas ini, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, yang secara langsung berdampak pada perkembangan manusia.

Ketimpangan pendapatan merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi IPM secara signifikan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan dan pendidikan. Ketimpangan ini menyebabkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi lebih sulit bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Wilkinson & Pickett, 2020). Banyak negara berkembang cenderung lebih fokus pada pemanfaatan modal daripada tenaga kerja dalam aktivitas ekonominya, sehingga keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Jika pendapatan nasional tidak didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dianggap terjadi ketidaksetaraan (Hartono, 2018). Ketidaksetaraan pada kenyataannya tidak dapat dihapuskan dalam pembangunan suatu wilayah. Adanya ketidaksetaraan mendorong wilayah yang tertinggal untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak tertinggal jauh dari wilayah sekitarnya (Todaro dan Smith, 2020). Selain itu, wilayah-wilayah tersebut akan bersaing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketidaksetaraan dalam

hal ini dapat memberikan dampak positif. Namun, ada pula dampak negatif yang timbul dari ketidaksetaraan yang semakin tinggi antar wilayah. Dampak negatif tersebut meliputi ketidaksetaraan ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidaksetaraan yang tinggi umumnya dianggap tidak adil.



Sumber: Data BPS, 2025

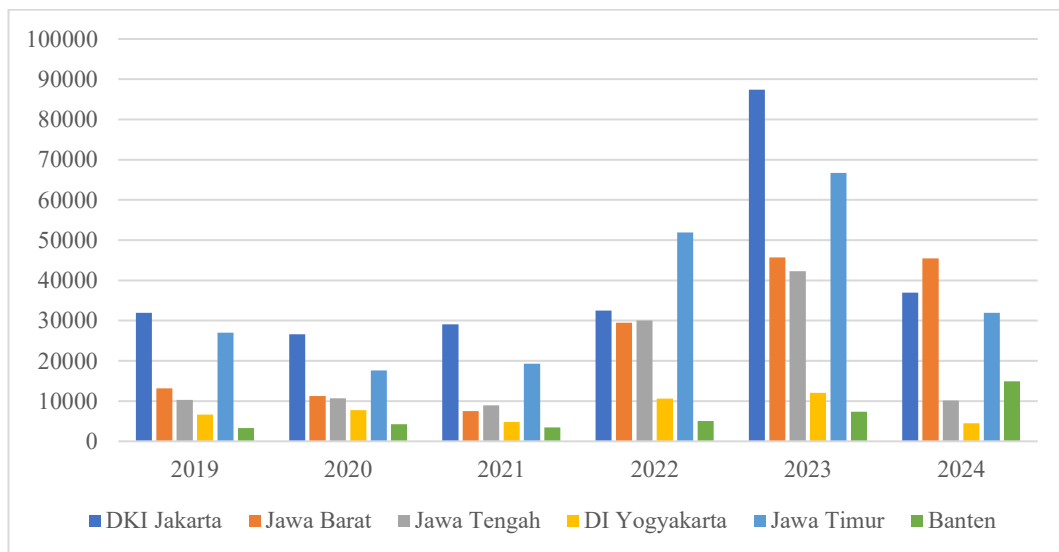
Gambar 1. 5

Data Gini Ratio pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2024 (persen)

Berdasarkan gambar 1.5 dapat diketahui bahwa nilai Gini Rasio di Pulau Jawa tahun 2019-2024 fluktuatif. Selain itu, tahun 2019-2024 posisi angka Gini Rasio di Pulau Jawa masih ada yang berada di atas angka Gini Rasio nasional. Angka ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa masih tinggi meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan perekonomian. Sebagai contoh, provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dengan Gini Ratio masing-masing 0,431 dan 0,428 pada tahun 2024 (BPS, 2024), yang berpotensi menghambat peningkatan IPM secara menyeluruh.

Faktor lain yang berpengaruh adalah kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat mencerminkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang dapat

berdampak pada pembangunan manusia. Teori tentang ekonomi kriminalitas menyatakan bahwa tingginya tingkat kriminalitas sering kali berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran. Kejahatan akan merugikan masyarakat secara material atau imaterial, serta merugikan negara (Becker, 2018).



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1. 6

Data Tingkat Kriminalitas pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2024 (persen)

Data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri, 2024) menunjukkan bahwa angka kriminalitas di beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta (87.426 kasus) dan Jawa Timur (66.741 kasus) pada tahun 2023, cenderung tinggi dalam periode 2019-2024. Tingginya angka kriminalitas dapat menghambat investasi di sektor pendidikan dan kesehatan serta menciptakan ketakutan sosial yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap IPM.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat *research gap* yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada

hubungan antara satu atau dua variabel ekonomi terhadap IPM tanpa mempertimbangkan interaksi multidimensional dari faktor kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas secara bersamaan. Banyak penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi hubungan antara satu atau dua variabel sosial ekonomi terhadap IPM. Namun, sedikit penelitian yang mengkaji secara simultan dampak kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas terhadap IPM secara menyeluruh, terutama dalam konteks regional seperti Pulau Jawa. Beberapa studi yang dilakukan, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan IPM, tetapi belum memperhitungkan pengaruh simultan dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kriminalitas dalam analisis yang sama (Haryono, et al., 2023). *Research gap* ini menjadi celah yang menarik untuk dieksplorasi dalam penelitian ini untuk memahami hubungan yang lebih komprehensif antara variabel-variabel tersebut dengan IPM di Pulau Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas terhadap IPM di enam provinsi di Pulau Jawa dalam periode 2015-2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia di wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi memiliki permasalahan sosial yang kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa Faktor seperti tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan

ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 6 Provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Dan Kriminalitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2015-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2015-2024.
2. Pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia

pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi ilmiah dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru. Khususnya dalam penelitian ini menggunakan variabel kriminalitas, dikarenakan kebanyakan dalam penelitian lain hanya menggunakan variabel kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi saja. Penelitian dengan variabel yang serupa ini dikategorikan sebagai penelitian yang jarang diteliti. Oleh karena itu, diharapkan dengan menambahkan variabel Kriminalitas ini dapat memberikan kontribusi ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana pengaruh variabel ekonomi makro terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di Pulau Jawa.
- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama serta permasalahan yang sama, ataupun ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi para pembaca.

- c. Bagi pemerintah, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam masalah indeks pembangunan manusia, dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait indeks pembangunan manusia di provinsi di Pulau Jawa.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan lingkup Pulau yaitu Pulau Jawa. Peneliti melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu publikasi laporan indeks pembangunan manusia, kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal- jurnal terkait.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026 diawali dengan pengajuan judul kepada Jurusan Ekonomi Pembangunan. Dengan rincian waktu penelitian pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Uraian Pelaksanaan	Tahun 2025 - 2026							
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb - Mar	Apr	Mei	Juni
Pengajuan Judul								
Penyusunan Proposal Penelitian								
Pengajuan Proposal Penelitian								
Sidang Proposal Penelitian								
Revisi Proposal Penelitian								
Pengumpulan dan Pengolahan Data								
Proses Bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi								
Seminar hasil								
Revisi Seminar Hasil								
Sidang Skripsi								